

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
PADA SEKTOR PEMBANGUNAN EKONOMI
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI****Sarjan M**

Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kuantan Singingi, Riau

Email : sarjanfadlan@gmail.com**ABSTRAK**

Salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Riau adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Sebagai daerah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab, Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai perumus kebijakan tentu yang harus dipacu adalah masalah pembangunan ekonomi daerah. Orientasi pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat menuju kearah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan adalah bagian dari kebijakan yang diprioritaskan dari seluruh bentuk kebijakan pembangunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan tergantung sejauhmana keseriusan pemerintah dalam proses kebijakan pembangunan ekonomi tersebut.

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan kebijakan sektor pembangunan ekonomi, implementasi kebijakan ekonomi dan dampak pembangunan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil penelitian yang diperoleh ternyata kebijakan pemerintah daerah pada sektor pembangunan ekonomi tidak merujuk kepada program yang telah dirumuskan. Dimana kondisi dilapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih rendah. Sedangkan kegiatan pembangunan ekonomi bersifat terpusat dan kualitas kehidupan masyarakat masih rendah.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan dan Pembangunan Ekonomi**ABSTRACT**

Kuantan Singingi is one of cities in Riau. This city was formed based on law number 53 of 1999. In this case, as a region that has the authority and responsibility the local government must be accelerated economic development local problem. Economic development orientation is a change that occurs in society lives toward better lives. Economic development activity is a prioritized from all of development policies. Thus, it can be said that the development success depends on the extent of government serious on economic development policy process.

The aims of this research carried out to analyze the process of economic development sector policies, the implementation of economic policy and the impact of economic development on welfare society in Kuantan Singingi. Based on the result of this research, it turns out that the local government policy in the economic development sector was not refer to programs that have been formulated. In the field, the economic growth was still low. Meanwhile, economic development and quality of society lives was still low.

Key Words : An Analysis Of Economic Development Policy

PENDAHULUAN

Pada umumnya pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia didasarkan pada tiga pendekatan, yakni pendekatan makro, sektoral, regional. Pembangunan makro mencakup sasaran secara nasional yang pencapaiannya adalah hasil dari upaya-upaya yang dilihat dari tingkat sektoral dan regional (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2004:42).

Pemikiran tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan sektoral yang difokuskan adalah pada bidang tertentu, misalnya ekonomi, pertanian dan sebagainya. Sedangkan pembangunan regional menekankan pada pelaksanaan pembangunan disuatu daerah tertentu yang pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan nasional itu sendiri.

Menurut Propenas, Pembangunan Nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan RI, yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Pembangunan yang dipandang sebagai suatu proses transformasi dan peran serta masyarakat akan menghasilkan surplus terhadap peningkatan kesejahteraan kemudian selanjutnya pembangunan tersebut akan dinikmati oleh masyarakat secara merata.

Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung Propenas maka Pemerintah Pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui otonomi daerah. Maksud dan tujuannya ialah menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah, karena dengan pembangunan daerah itulah yang akan dapat menjangkau ke pelosok negeri.

Sesuai dengan yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana menekankan kepada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Undang-undang tersebut juga menitikberatkan agar daerah lebih bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik terutama dilihat dari aspek ekonomi. Peningkatan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian program pemerintah daerah yang telah diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu (Riyadi dan Bratakusumah, 2004:44).

Salah satu daerah dalam memacu dan mewujudkan pemerataan, keadilan, dan kualitas kehidupan daerah yang lebih baik di Propinsi Riau pada sektor pembangunan adalah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang seyogianya melaksanakan hal tersebut. Sebagai langkah kongkrit dan komitmen pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah menyusun suatu mekanisme pola perencanaan sebagai bahan pedoman bagi pembangunan daerah dan kerangka tersebut merupakan penjabaran dari Ketetapan MPR RI Nomor: IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia Tahun 1999-2004 yang berisikan kondisi potensi daerah, situasi yang tumbuh dan berkembang. Kerangka tersebut adalah pola dasar pembangunan daerah sebagai pernyataan kehendak masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

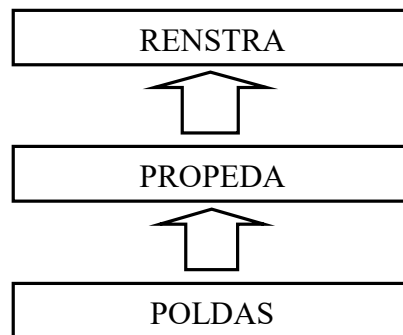
Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang ada tergambar pada Visi dan Misi pembangunannya, yaitu; adanya persepsi

yang sama dalam mewujudkan dan menciptakan keadaan yang diinginkan dimasa yang akan datang oleh segenap komponen masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang hakiki, bermoral, dan tangguh menghadapi era global dan modern (Bappeda Kuansing).

Setelah adanya penetapan Pola Dasar (POLDAS) pembangunan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut, selanjutnya

dirumuskanlah Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis Daerah (RENSTRA) Pembangunan. Perumusan arah kebijakan pembangunan yang sudah digariskan dalam Propeda dan Renstra disusun sesuai dengan Poldas tersebut. Dengan demikian, tiga mekanisme pola perencanaan itulah yang dijadikan acuan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Gambar 1 :
Mekanisme Pola Perencanaan Pembangunan Kuantan Singingi



Gambar di atas merupakan referensi kebijakan pembangunan daerah dalam masa lima tahun kedepan dan dimulai pada tahun 2002 sampai dengan 2006. Perumusan kebijakan pembangunan yang terdapat pada Propeda dan Renstra secara umum, yaitu: *Pertama*, program pembangunan jangka pendek. *Kedua*, program pembangunan jangka panjang.

Adapun sasaran kebijakan program pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
2. Tersedianya kebutuhan pangan masyarakat.
3. Terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tumbuh dan berkembangnya usaha kecil, menengah dan koperasi.
4. Tersusunnya konsep pembangunan ekonomi yang

mengacu pada kemandirian otonomi daerah yang nyata.

5. Meningkatkan sumbangan PAD dan investasi swasta.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Makalah Pemda Kuansing, 2004).

Melihat sasaran kebijakan pembangunan daerah Kuantan Singingi diatas, jelas sekali bahwa perhatiannya lebih memusatkan pada pembangunann ekonomi. Akan tetapi perjalanan roda kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir semenjak berdirinya, menurut hasil observasi pra riset yang telah dilakukan oleh penulis dari perspektif pembangunan ekonomi bahwa ditengah-tengah kehidupan masyarakatnya belum ada perubahan yang signifikan.

Permasalahan itu dapat kita lihat dari implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu; *Pertama*, kebijakan pembangunan yang tidak tetap sasaran. *Kedua*, aspek pembangunan lebih difokuskan pada infrastruktur. *Ketiga*, proyek pembangunan bersifat terpusat dan kurangnya memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan. *Keempat*, pembangunan ekonomi tidak memperhatikan potensi daerah. *Kelima*, pemberdayaan masyarakat dalam bidang pembangunan ekonomi belum maksimal. Dengan demikian titik perhatian

pembangunan hanya terpusat pada pertumbuhan bukan pemerataan hal itu tentu berdampak negatif dilihat dari konteks totalitas pembangunan ekonomi itu sendiri.

Masalah-masalah lain dalam pembangunan juga banyak dijumpai pada realisasi anggaran yang tidak memperhatikan prioritas ekonomi sementara sektor tersebut selanjutnya di prioritaskan.

Kebijakan anggaran pada sektor pembangunan untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1 :
Realisasi APBD untuk Sektor Pembangunan Tahun 2003

No.	Sektor Pembangunan	Anggaran
1.	Sektor Industri	156.500.000,00
2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	4.894.862.500,00
3.	Sektor Sumber Daya Air dan Mineral	6.606.621.448,00
4.	Sektor Tenaga Kerja	190.000.000,00
5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	12.055.704.000,00
6.	Sektor Transportasi	57.400.855.158,00
7.	Sektor Pertambangan dan Energi	852.000.000,00
8.	Sektor Pariwisata dan Komikasi Daerah	667.417.000,00
9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	3.747.522.400,00
10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	9.830.466.514,00
11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	19.477.766.245,00
12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	48.000.000,00
13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak-anak dan Remaja	7.857.000.000,00
14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman	2.824.000.000,00
15.	Sektor Agama	0,00
16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.048.000.000,00
17.	Sektor Hukum	70.000.000,00
18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	13.146.837.209,00
19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	244.250.000,00
20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	254.125.000,00
21.	Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0,00
Jumlah		141.371.927.475,00

Sumber : APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2003

Melihat realisasi kebijakan anggaran yang tidak mempertimbangkan dan memperhatikan prioritas ekonomi, masyarakat dalam hal ini sebagai sasaran pembangunan akan menilai dampak yang tidak baik bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi Kuantan Singingi kedepan. Sementara pembangunan ekonomi merupakan kehendak menuju perbaikan kehidupan yang bertumpu pada sendi dasar spiritual dan martabat manusia, artinya pembangunan ekonomi adalah aspek dari segala pembangunan sosial, politik, dan budaya. Jadi aspek-aspek ideal sangat penting sebagai dimensi utama dalam tujuan pembangunan, bukan semata-mata kemakmuran fisik.

Berbagai fenomena diatas, dimana kebijakan pembangunan yang selama ini terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi sudah tidak memperhatikan lagi rumusan yang telah ditetapkan dalam program pembangunan, maka dengan demikian perlu adanya tindakan berupa kebijakan pemerintah daerah untuk meninjau kembali pelaksanaan pembangunan tersebut yang seharusnya disesuaikan menurut visi dan misi pembangunan di zaman otonomi daerah.

Kebijakan menurut kepustakaan internasional disebut *policy* artinya kebijakan atau kebijaksanaan. Persoalan kebijakan dalam suatu negara merupakan bagian yang sangat urgen terutama bagi para pelaku pembuat kebijakan itu sendiri guna menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam masyarakat demokratis, masalah kebijakan begitu penting. Akan tetapi dilihat dari sudut pandang ekonomi atau sosio ekonomi hal tersebut lebih diutamakan lagi dalam kebijakan publik, oleh sebab itu kebijakan dijadikan sebagai alat bagi pejabat publik untuk lebih dapat menetapkan kebijakan-kebijakan secara lebih baik. Fenomena dilingkungan masyarakat juga terlihat statis dan fundamental, sehingga

membutuhkan proses pemecahan kebijakan yang lebih efektif dan intensif.

Dengan demikian proses kebijakan ialah berhubungan dengan lembaga elit dan pengikut-pengikutnya yang mempunyai kesamaan satu sama lainnya dalam memberikan pandangan-pandangan pada proses tersebut (Thoha, 1997:53). Lippman berpendapat bahwa kebijakan merupakan kepentingan publik yang harus dipilih menurut hati nurani masyarakat, diketahui dengan jelas dan mempertimbangkan secara rasional (dalam Suryaningrat, 1989:24). Sedangkan Carl Freidrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka merealisasikan suatu tujuan yang akan dicapai (dalam Winarno, 2004:1).

Adapun pendapat David Easton tentang kebijakan adalah sebagai pengaruh (*impact*) dari aktivitas pemerintah (dalam Nugroho, 2004:4). Dalam analisis sistemnya, Easton menambahkan "suatu konseptualisasi yang telah disiapkan (*ready-made*) guna membantu mengidentifikasi dan meneliti permasalahan utama yang akan dihadapi dalam suatu studi keluaran kebijakan (dalam Varma, 2001:291). Dengan demikian, kebijakan yang diusulkan atau *out put* yang dihasilkan harus mengandung konsekuensi moral, artinya ialah harus melalui pertimbangan-pertimbangan secara normatif dalam interaksi antara penguasa, penyelenggara dengan masyarakat, serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan diatas N. Dunn (2003:26-28) memberikan gambaran mengenai proses pembuatan kebijakan yang merupakan

serangkaian tahap demi tahap yang meliputi;

a. Penyusunan agenda kebijakan

Pada tahap ini terdapat rumusan masalah guna mencari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan. Perumusan tersebut membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Formulasi kebijakan

Tahap ini melakukan peramalan yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang terjadi dimasa mendatang sebagai tindakan alternatif. Peramalan menguji masa depan yang potensial, secara normatif bernilai, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

c. Adopsi kebijakan

Dalam tahap ini melakukan rekomentasi terhadap arternatif yang akan dipilih melalui pendekatan pengetahuan yang relevan dengan prinsip-prinsip kebijakan. Rekomendasi membantu estimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalisasi dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan keputusan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

d. Implementasi kebijakan

Pada tahap ini pengambilan kebijakan berusaha melakukan pemantauan (monitoring) tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya atas dasar pengetahuan yang relevan dengan konsep-konsep tersebut. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat

yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak-letak pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

e. Evaluasi kebijakan

Di bagian evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan benar-benar dihasilkan. Tujuan ini membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan, menyumbangkan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Dalam kamus ilmiah populer “analisis” atau juga disebut dengan kata analisa, yaitu segenap rangkaian perbuatan yang menelaah sesuatu secara mendalam (Alex, 2001:27). Analisa juga dapat diartikan sebagai langkah kegiatan untuk melihat dan membeberkan fakta dan data tentang sesuatu hal (Rasul. Dkk, 2000:2). Melihat dari pengertian tersebut, analisis adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menelaah sesuatu secara mendalam dan akurat dengan menggambarkan dan membeberkan sesuai data dan fakta mengenai sesuatu hal.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan secara sederhana tentang pekerjaan analisis. Kegiatan dalam melakukan analisis meliputi pengumpulan data dan fakta, baik secara keseluruhan maupun sampel, mengklasifikasikan, mengkategorikan, membanding-bandingkan, memberikan komentar atau kritik, dan menyimpulkan hal-hal yang telah dideskripsikan dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami orang lain. William N. Dunn (2003:29) memberikan penekanan terhadap analisis kebijakan atau kebijaksanaan sebagai suatu terapan yang menggunakan berbagai metode dan argumen untuk

menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang dimanfaatkan pada tingkat politik untuk memecahkan masalah publik.

Budi Winarno dalam bukunya "Teori dan Proses Kebijakan Publik" (2004:27) ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan, yakni; pertama, fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang "Pantas". Kedua, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metode ilmiah. Ketiga, analisis kebijakan dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan diatas, ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam analisis kebijakan, yaitu;

- a. Pendekatan kelompok
- b. Pendekatan proses fungsional
- c. Pendekatan kelembagaan
- d. Pendekatan peran serta warga negara
- e. Pendekatan psikologis

Pembangunan merupakan kata netral dan ambiguitas dalam pandangan umum. Maksudnya ialah suatu kata yang menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya. Melihat pengertian ini makna pembangunan masih bersifat umum dan tentu harus dipertegas lagi menurut pendapat para ahli dalam bidang pembangunan.

Menurut Michael Todaro menyimpulkan pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting di dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga nasional dan juga akselerasi

pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan (dalam Bryan dan White, 1989:3). Pendapat Inayatullah, pembangunan ialah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang lebih dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, serta memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Kemudian ditambahkan oleh Rogers pembangunan ialah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam masyarakat dan dimaksudkan untuk kemanjuran sosial dan materil (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka (dalam Nasution, 2002:28).

Sedangkan W.W. Rostow memberikan pandangan, bahwa pembangunan sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi, dan sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern (dalam Fakhri, 2001:55). Kemudian menurut Siagian (2000:4) pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara, bangsa, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan pemaparan terhadap fenomena ataupun gambaran situasi yang berdasarkan data-data yang ada. Kemudian diteruskan dengan melakukan interpretasi sebagai alur untuk menjelaskan dan menganalisis pada faktor-faktor tertentu terhadap masalah

yang diteliti dan terakhir berusaha memprediksikannya. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah “Tinjauan Pustaka dan Lapangan (*Library and Field*). Sedangkan yang menjadi populasi adalah unsur Sekretariat Daerah, Bappeda, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berhubungan dengan masalah pembangunan ekonomi dan sebagai sampel penulis menggunakan teori yang disampaikan oleh Moleong (2000:165-166), yaitu ; sampel bertujuan (*purposive sample*). Pada sampel bertujuan jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan dan jika ternyata terjadi pengulangan atau memberikan informasi

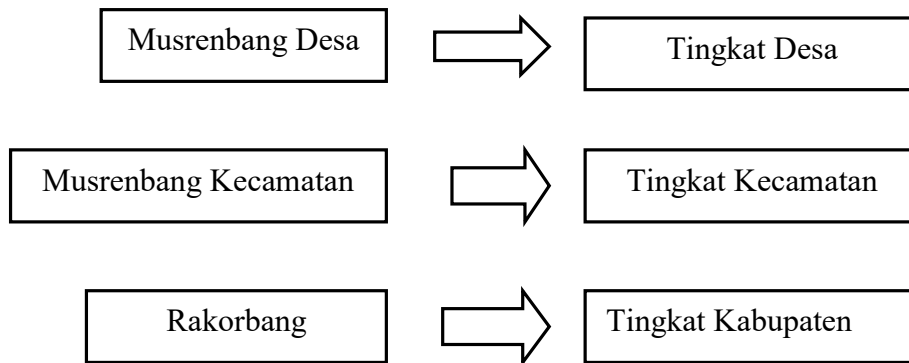
yang sama, maka pencarian informasi sudah boleh diakhiri. Maka sampelnnya adalah 2 (dua) orang di Sekretariat Daerah, 2 (dua) orang di Sekretariat DPRD dan 2 (dua) orang di Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pengambilan Kebijakan Sektor Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi

Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan secara sederhana proses pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mulia dari tahap penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi sebagai berikut :

Gambar 2 :
Proses Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Wawancara dengan Bappeda Kuantan Singingi

Dari gambar diatas dapat kita lihat dimana Pemerintahan Desa mengadakan pertemuan yang dinamakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pada pertemuan ini perangkat desa akan membicarakan agenda-agenda pembangunan yang akan diusulkan. Hasil perencanaan pembangunan yang diputuskan di tingkat desa akan diajukan pada tingkat kecamatan.

Untuk tingkat kecamatan disebut Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan, dimana pada tingkat

kecamatan pembahasan perencanaan pembangunan merupakan hasil dari Musrenbang Desa masing-masing. Dalam Musrenbang Kecamatan, akan Musrenbang Desa akan dipilah-pilah secara sektoral sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan hasil tersebut diserahkan sepenuhnya kepada instansi terkait. Pembahasan yang telah diserahkan itu dimasukkan ke anggaran pembangunan dan instansi menghasilkan daftar usulan kegiatan.

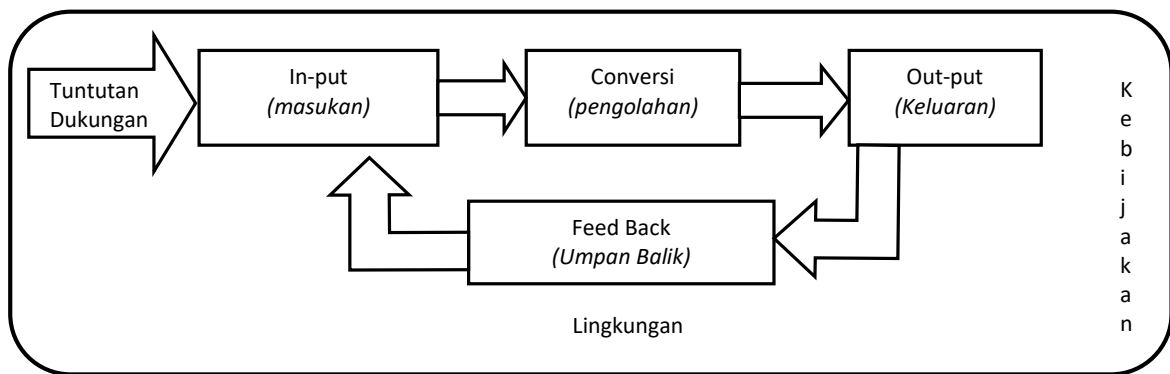
Setelah menghasil daftar usulan kegiatan kemudian pembahasan

selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) di tingkat Kabupaten. Rapat ini dihadiri oleh instansi terkait, Dinas maupun Badan yang telah menghasilkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan, kemudian diadakan dengan pendapat bersama Kepala Daerah yang didampingi Bappeda sebagai akomodasi dari seluruh hasil pertemuan tersebut.

Proses selanjutnya yaitu Kepada Daerah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) kepada DPRD. Lembaga Legislatif akan mengadakan sidang, dimana sidang itu dihadiri oleh semua komponen yang ada di DPRD mulai dari Fraksi, Komisi dan Badan Anggaran dalam kesempatan ini akan melakukan pembahasan terhadap RAPBD yang telah diusulkan tersebut. Untuk lebih jelasnya bagaimana model pengambilan keputusan perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat gambar dibawah ini:

Gambar 3 :
Model Pengambilan Keputusan Pemerintah Kuantan Singingi



Sumber : Wawancara dengan Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan pada gambar diatas dapat diketahui bahwa proses pengambilan keputusan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut:

1. *In-put* (masukan), yaitu; dimana pejabat publik memusatkan perhatiannya pada tuntutan maupun dukungan dari lingkungan luar, misalnya masyarakat dan lembaga-lembaga indeviden lainnya yang berkepentingan diawali dari tingkat pedesaan, kecamatan, dan tingkat kabupaten sebagai bahan perumusan agenda dan diteruskan pada tahap berikutnya.

2. Dalam perumusan agendanya, isu harus mencapai kritis tertentu sehingga tidak bisa di abaikan begitu saja. Isu sampai pada titik yang dapat menimbulkan dampak yang positif bagi kepentingan masyarakat luas.

3. *Conversi* (pengolahan), yaitu pada bagian ini meliputi tahap formulasi dan adopsi. Tahap formulasi pejabat publik melakukan peramalan sebagai alternatif yang dipilih pada tingkat eksekutif. Sedangkan dalam proses adopsi berusaha mencari dukungan mayoritas dari pihak-pihak legislatif tentang alternatif yang telah

direkomendasikan tersebut berdasarkan proporsi anggaran.

4. *Out-put* (keluaran), yaitu; berdasarkan pengelohan yang telah dilakukan pihak eksekutif bersama-sama dengan legislatif, maka proses itu menghasilkan keluaran berupa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Pengesahan kebijakan itu akan sampai pada tahap implementasi atau pelaksanaan kebijakan oleh unit-unit pemerintahan terkait sekaligus melakukan evaluasi.

Sesuai dengan penjelasan pada gambar diatas dapat diketahui bahwa proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan di Kuantan Singingi bersifat Bottom up. Sedangkan menurut hasil wawancara melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyebutkan dimana proses perencanaan yang tadinya bersifat dari arus bawah (Bottom up), namun pada saat pengelolaan dan penetapan program pembangunan bersama legislatif sarat dengan kepentingan-kepentingan.

Pada kesempatan yang sama dengan informan yang berbeda yaitu melalui hasil wawancara dengan pihak Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang menyampaikan perihal yang sama tentang proses pengambilan kebijakan. Dari hasil wawancara itu mereka menceritakan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam proses tersebut, dimana pihak legislatif seolah-olah memiliki "power" yang sangat besar dengan mengedepankan prinsip dan pendekatan politis mereka masing-masing. Hal ini menyangkut emosi dan ego dilain pihak yang menyebabkan munculnya kepentingan segelintir orang yang berdampak merugikan semua kepentingan publik.

Kondisi seperti ini akan memunculkan paradig-paradigma yang berlawanan dengan rumusan program pembangunan yang telah diajukan oleh pihak eksekutif sebelumnya. Artinya, proses pengesahan dalam sebuah kebijakan yang menyangkut keabsahan dan legitimasi serta kepentingan kekuasaan dalam pembangunan ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik mereka.

Dengan demikian dari beberapa informan yang dimintai keterangannya terutama pihak-pihak yang berhubungan langsung tentang kebijakan pembangunan ekonomi memberikan jawaban yang sama. Dimana jawaban yang menyinggung tentang proses penetapan kebijakan program pembangunan tersebut lebih didominasi oleh intervensi sistem politik dan juga terjadinya "bargaining" antara eksekutif dengan legislatif di lembaga legislatif, sehingga hal itu tanpa memperhatikan lagi aspirasi arus bawah yaitu masyarakat. Sekali lagi dikatakan bahwa kondisi ini tidak konsisten dengan rumusan semula.

2. Dampak Pembangunan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam teori ilmu pembangunan menyebutkan bahwa kegiatan pembangunan harus memberikan efek yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah akan dilihat dari tiga indikator, yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan Rata-Rata

Istilah pembangunan dalam banyak hal diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat dalam wilayah tertentu. Keberhasilan pembangunan ekonomi sering sekali menggunakan tolak ukur kekayaan rata-rata, karena dengan

melihat kekayaan rata-rata itulah kesejahteraan pembangunan ekonomi dalam suatu daerah bisa diketahui. Dengan demikian, yang diukur itu adalah tingkat produktivitas masyarakat dalam setiap tahunnya.

Dalam bahasa ekonominya, menurut Sukirno (2003:34-35) produktivitas ekonomi diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) pada suatu negara tertentu dalam suatu tahun menurut nilai harga-harga yang berlaku. Sedangkan bagi daerah, menurutnya akan diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pendapatan barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah dalam satu tahun berdasarkan harga yang berlaku. Melihat lokus penelitian penulis, maka yang digunakan dalam tolak ukur pembangunan ekonomi disini tentu berdasarkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atau mata pencarian masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dalam suatu tahun tertentu atas dasar harga yang berlaku.

Sebelum melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terlebih dahulu kita cermati pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pertumbuhan ekonomi Kuantan Singingi dalam periode tahun 2001 tercatat sebesar 5,43 %. Pertumbuhan yang seperti ini dalam teori ilmu ekonomi makro cukup tinggi dan tahun 2002 pertumbuhan perekonomian tercatat sebesar 4,93 % kondisi ini menunjukkan bahwa relative kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara ditahun 2003 pertumbuhan tercatat 4,98 %. Keadaan yang demikian menunjukkan terjadinya peningkatan yang sangat tipis. Dengan demikian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kuantan Singingi dari tahun 2001 sampai dengan tahun

2003 tidak stabil bahkan terjadinya penurunan ditahun 2002.

Berdasarkan data-data pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi yang serba delematis dan tidak adanya tanda-tanda pertumbuhan yang signifikan dari tahun-ketahun. Ini menunjukkan bahwa ekonomi daerah tidak dapat berdiri sendiri dari sistem makro ekonomi nasional. Terutama dipengaruhi oleh kondisi sosial politik. Hal senada dijelaskan oleh Sukirno dalam ekonomi makro, dimana pertumbuhan ekonomi diantara 4 % dikategorikan sebagai pertumbuhan yang rendah.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian pendapatan daerah. Kondisi ini dapat diamati dari kecilnya pembiayaan kegiatan pembangunan daerah dan pada akhirnya pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak optimal. Gambaran perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa sektor pertanian lebih mendominasi atau berada pada puncak yang tertinggi. Dimana pada tahun 2001 tercatat sebesar 546.296,31 atau 59,6 % dan tahun 2002 mengalami kenaikan menjadi 651.028 atau 59,26 dan ditahun 2003 mencapai 666.773,16 tetapi persentasenya turun menjadi 58,18 %.

Sedangkan sektor jasa-jasa diposisi kedua, dimana pada tahun 2001 memberikan kontribusi sebesar 109.238,39 atau 11,92 % ditahun 2002 naik menjadi 131.679,88 atau 11,99 % dan ditahun 2003 juga terjadi kenaikan menjadi 151.520,44 atau 12,60 %.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati posisi ketiga yang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nya pada tahun 2001 tercatat sebesar 87.977,67 atau 9,60 %, tahun 2002 meningkat menjadi 105.107,57 atau 9,57 % dan hingga tahun 2003 masih

terjadi kenaikan sehingga menjadi 115.051,83 atau 9,57 %.

Posisi keempat sektor bangunan pada tahun 2001 senilai 55.313,48 atau 6,03 %, tahun 2002 menjadi 69.689,49 atau 6,34 % dan tahun 2003 juga mengalami kenaikan menjadi 77.649,65 atau 6,45 % . sektor industri pengolahan diposisi kelima yang kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap daerah yaitu pada tahun 2001 sebesar 51.281,92 atau 5,59 %, ditahun 2002 bertambah menjadi 59.329,78 atau 5,40 % (2002) dan tahun 2003 sebesar 66.709,10 atau 5,55 %.

Kontribusi PRDB sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan pada tahun 2001 tercatat sebesar 26.247,29 atau 2,86 %, ditahun 2002 menjadi 32.026,89 atau 2,29 % dan tahun 2003 terhitung sebesar 35.446,03 atau 2,95 %. Urutan ketujuh sektor pengangkutan pada tahun 2001 yang kontribusinya tercatat 19.401,81 atau 2,12 % ditahun 2002 yaitu 24.331,39 atau 2,21 % dan tahun 2003 senilai 27.492,57 atau 2,29 %.

Sektor pertambangan dan penggalian tahun 2001 sebesar 17.467,15 atau 1,91 % , ditahun 2002 naik menjadi 21.571,93 atau 1,96 % dan ditahun 2003 mencapai 24.744,52 atau 2,06 %. Diposisi terakhir adalah sektor listrik dan air minum yang memberikan kontribusinya untuk daerah pada tahun 2001 sebesar 3.180,69 atau 0,35 %, ditahun 2002 senilai 3.816,07 atau 0,35 % dan tahun 2003 mencapai hingga 4.253,54 atau 0,35 %.

Dari uraian di atas sangat jelas sekali bahwa sektor pertanian memiliki sumbangan terbesar dalam PDRB. Perkembangan PDRB Kuantan Singingi yang dipengaruhi oleh sektor pertanian akan mengakibatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat menjadi lamban. Fenomena ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tersedia ditengah-tengah kehidupan masyarakat serba terbatas. Dan disamping itu juga

corak pertanian masyarakat masih dikategorikan rendah dan belum sampai pada tahap swasembada pangan. Melihat keadaan tersebut diversifikasi dan ekstensifikasi pertanian dilakukan secara optimal dan terpadu guna mengatasi dan meningkatkan hasil pertanian.

b. Pemerataan

Pemerataan pembangunan dalam hal ini ialah tingkat perbandingan penyebaran kegiatan sub sektor perekonomian pemerintah di Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Artinya, ini akan dilihat dari beberapa banyaknya proyek kegiatan-kegiatan ekonomi yang menunjang tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah. Sebagai perbandingan awal akan dilihat kegiatan pemerintah pada sektor pembangunan. Pada tahun 2003 kegiatan pemerintah pada sektor pembangunan menitikberatkan pada sektor pembangunan sosial, budaya dana agama yaitu, sebanyak 121 kegiatan atau 68,75 %. Dalam visi dan misi daerah program pembangunan sektor ekonomi adalah skala prioritas pembangunan, tetapi faktanya hanya 34 kegiatan atau 19,31 %.

Dari hasil wawancara dengan Bappeda bahwa kondisi seperti ini terjadi dikarenakan Pemerintah Daerah lebih mementingkan aspek pembangunan fisik sebagai sarana penunjang aktivitas pemerintahan. Namun, alasan seperti ini tidaklah logis, karena dalam konsep perencanaan pembangunan yang harus dikedepankan adalah prinsip keseimbangan guna menghindari kesenjangan.

Sebagai daerah yang termiskin ketiga di Propinsi Riau yang mencapai 27,5 % dari jumlah penduduknya, seharusnya yang dipacu adalah pembangunan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari usaha untuk mengatasi kemiskinan. Disamping itu, pembangunan ekonomi merupakan skala prioritas pembangunan dalam mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Sementara itu implementasi pemerataan kegiatan ekonomi per-Kecamatan di Kuantan Singingi tersebut kegiatan pembangunan ekonomi bersifat terpusat, hanya didominasi oleh Kecamatan Kuantan Tengah yang tercatat 15 kegiatan atau 20,83 % ditahun 2001, pada tahun 2002 sekitar 18 kegiatan atau 12,68 % dan 17 kegiatan atau 13,76 % pada tahun 2003, kemudian penulis juga melihat hal yang sama yaitu pembangunan ekonomi hanya banyak terdapat di kecamatan sekitar Ibukota Kabupaten. Kondisi diatas dapat kita simpulkan bahwa tingkat penyebaran proyek pembangunan di Kuantan Singingi tidak merata.

c. Kualitas Kehidupan

Menurut Barata dkk (2004:1) secara ekonomis ada satu hal yang dituju dalam kehidupan orang perorang atau oleh masyarakat pada umumnya, yaitu keinginan untuk meningkatkan taraf hidup taua kualitas hidup. Dimana semua orang menginginkan penilaian dari titik satu ke titik lain yang lebih tinggi. Artinya peningkatan kualitas hidup sebagai bentuk kesejahteraan hidup atau kemakmuran yang didambakan setiap orang.

Kualitas kehidupan dalam pembangunan ekonomi merupakan pola perubahan yang terjadi dalam masyarakat kearah baik sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perekonomian. Menurut Siagian (2003:31) bahwa peningkatan kualitas kehidupan berkisar pada peningkatan taraf hidup. Tujuannya merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya segala kebutuhan hidup. Jadi, perhatian utamanya ditujukan pada kemampuan masyarakat untuk memuaskan berbagai kebutuhan yang bersifat primer dan biasanya terwujud dalam kebutuhan yang bersifat materil. Tujuannya adalah agar berbagai kebutuhan primer tersebut dapat

terpenuhi baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Untuk memenuhi segala kebutuhan hidup yang serba kompleks dan serba terbatas dari aspek materil, dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat mata pencaharian masyarakat. Artinya, kualitas kehidupan akan bertumpu pada usaha-usaha atau mata pencaharian penduduk.

Tingkat mata pencaharian penduduk Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa pada tahun 2003 tercatat sekitar 82,51 % penduduk Kuantan Singingi bermata pencaharian bergerak dibidang pertanian. Tercatat sekitar 6,98 % jasa-jasa lainnya, yang bergerak dibidang perdagangan, hotel dan restoran sekitar 6,98 %. Kemudian 2,13 % bergerak pada bidang industri pengelohan. Sementara yang bergerak dibidang bangunan tercatat 1,95 % sedangkan dibidang pengangkutan sekitar 1,85 % dan terakhir bidang pertambangan dan penggalian tercatat sekitar 0,12 %.

Berdasarkan penjelasan diatas perekonomian masyarakat di Kuantan Singingi banyak bergerak dibidang pertanian. Menurut analisis pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan masyarakat yang masih bergerak dibidang pertanian tingkat kesejahteraannya masih rendah, karena mata pencaharian bertani serendah-rendahnya lapangan usaha dan tidak memiliki skil dan tingkat profesional, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas kehidupan masyarakat Kuantan Singingi masih rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan yang telah deskrisikan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian tentang kebijakan pemerintah daerah pada sektor pembangunan ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu sebagai berikut;

1. Proses pengambilan kebijakan sektor pembangunan bersifat bottom up, yaitu dimulai dari tingkat desa/kelurahan, sedangkan untuk penetapan kebijakan pembangunan penuh dengan kepentingan dan intervensi.
2. Dampak pembangunan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari tiga indikator, sebagai berikut:
 - a. Pendapatan rata-rata, yang dilihat menurut perkembangan PDRB Kabupaten Kuantan Singingi masih rendah dan didominasi oleh sektor pertanian, sedangkan pertumbuhan ekonomi makro berada pada posisi yang rendah.
 - b. Pemerataan, kegiatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi bersifat terpusat atau terdapat pada Kecamatan disekitar Ibukota Kabupaten.
 - c. Kualitas Kehidupan, penduduk Kabupaten Kuantan Singingi tingkat mata pencahariannya mayoritas bergerak pada sektor pertanian, hal ini menunjukkan bahwa kualitas kehidupan masyarakat masih rendah.
2. Kebijakan Pemerintah Daerah harus melakukan pemberdayaan terhadap berbagai potensi ekonomi yang ada di wilayah kecamatan yang ada di Kuantan Singingi.
3. Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai upaya melalui dalam proses pengambilan kebijakan yang mengarah kepada kepentingan masyarakat, sehingga kebijakan yang ditetapkan bisa mengatasi kesenjangan sosial antar daerah yang pada akhirnya pendapatan bertambah, pemerataan dan kualitas kehidupan yang lebih baik terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex, MA., *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya, Alpa, 2000.
- Barata, Adya, Atep dan Bambang Trihartanto., *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, Jakarta, Alex Media Komputindo, 2004
- Budiman, Arief, Dr., *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta, Pustaka Utama, 2000.
- Briant, Colalie dan Louise G. White, Penerjemah Simatupang, RUsyanto L., *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta, LP3ES, 1989.
- Dunn, William N., *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Hanindita Graha Widya, Cet. Ke-10, 2003.
- Moleong, Levy J, Dr, MA., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nugroho, Rian D., *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta, Elex Media Komputindo, 2004.
- Riyadi, dan Deddy Supriadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi dalm*

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah sebagai masukan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pada Pemerintah Daerah dalam proses kebijakan pembangunan benar-benar memperhatikan aspirasi arus bawah yang sesuai dengan hati nurani masyarakat tanpa ada intervensi dan kepentingan.

Mewujudkan Otonomi Daerah.
Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
2004.

Siagian P. Sondang, Prof. Dr. MPA.,
*Administrasi Pembangunan:
Konsep, Dimensi, dan Strategi.*
Jakarta, Bumi Aksara, 2000.

Sukirno, Sadono., *Ekonomi Makro,*
Jakarta, Raja Wali Press, 2001.

Suwarsono dan Alvin Y. So, *Perubahan
Sosial dan Pembangunan.* Jakarta,
LP3ES, 2000.

Sugiyono. Dr., *Metode Penelitian
Administrasi.* Bandung, Alfabeta,
1997.

Varma SP., *Teori Politik Modern,*
Terjemahan Yohanes Kristiarto
dkk. Jakarta, Raja Grafindo
Persada, 2001.

Widjaja, HAW, Drs, Prof., *Otonomi
Daerah dan Daerah Otonom,*
Jakarta, Raja Grafindo Persada,
2002.

Sumber-Sumber Lain

APBD Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003

Makalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2004
Kuantan Singingi dalam Angka
Tahun 2003

Laporan Pertanggungjawaban Bupati
Kuantan Singingi Tahun 2001, 2002 dan
2003